

ABSTRAK

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas tindakan faktual yang bertentangan dengan Undang-Undang dan AUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum alinea ke-lima UU AP tidak diatur lebih lanjut mengenai hukum beracara dan kewenangan mengadilinya. Kekosongan hukum tersebut kemudian melahirkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagai pengaturan baru sekaligus memberikan perluasan terhadap kompetensi Peratun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa PMH atas tindakan faktual oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Metode penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penulisan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya perluasan kompetensi absolut Peratun serta ketentuan baru dalam menindak PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terutama yang disebabkan atas tindakan faktual.

Kata Kunci: Kompetensi absolut Peratun, Perbuatan Melanggar hukum.

ABSTRACT

Unlawful act by a Government Agency and/or Government Official for factual acts that are against the law and the principle of good governance as mentioned in the fifth paragraph of the general explanation of Government Administration Law is not regulated further regarding the legal proceedings and the judicial authority. The lack of regulation initiate Supreme Court's Regulation Number 2/2019 regarding Guidelines for Dispute Settlement of Government Actions and Authority to Judge Unlawful Acts by Government Agency and/or Government Official as a new regulation and also to provide expansion of Administrative Court's competence to examine, decide, and settle the disputes of Unlawful acts for factual acts by Government Agency and/or Government Official. This paper uses a juridical-normative approach as a method of research. The purpose of this paper is to show an expansion of Administrative Court's absolute competence and a new regulation in order to settle disputes of Unlawful act by Government Agency and/or Government Official especially that are caused by factual acts.

Keyword: *Administrative Court's absolute competence, Unlawful act.*